

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Reformasi Pelayanan Publik Lewat Sidak OPD, Tegaskan ASN Harus Jujur dan Tepat Waktu



Sidak Bupati Buton Selatan H Muh Adios di Kantor OPD

Laporan: Mashuri
Selatan dan kompleks perkantoran Bumi Praja Masiri, Selasa. Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta meningkatkan etos kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

Laboratorium Daerah Kota Baubau, Siap Layani Pemeriksaan Kesehatan Untuk Masyarakat Kepulauan Buton



Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau di Kawasan Palagimata, merupakan laboratorium pertama dan terlengkap yang dapat melayani pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat di Kepulauan Buton meliputi, Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara hingga di Wakatobi /Foto: Ardi-Baubau Post

Mahasiswa Teknik Perkapalan UNDIP, Alumni SMAN 2 Baubau Muh Haykal Faturrahman Kasri Bersinar di Ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Halu Oleo, Gagas Teknologi Transportasi Laut



RAKHA ABNA HAYKAL KASRI
TIM EKALAWYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bupati Buton Alvin Akawijaya Temui Dirjen Bina Marga Perjuangkan Peran Strategis Industri Hilirisasi Aspal Buton

Laporan: La Harman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON, BP - Pemerintah pusat memperkuat agenda hilirisasi Aspal Buton (Asbuton) melalui penyusunan regulasi baru yang menargetkan peningkatan penggunaan Aspal Buton di berbagai wilayah Indonesia. Kabupaten Buton pun didorong menjadi salah satu pusat utama pengembangan industri Asbuton nasional seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap potensi sumber daya alam strategis tersebut.



Bupati Buton Alvin Akawijaya perjuangkan Hilirisasi Aspal Buton di Jakarta

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Aliansi Pengembang Aspal Buton (ASPABI) yang berlangsung di Hotel Ibis Styles BSD pada 12-13 Mei 2026. Forum tersebut dihadiri unsur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur

Lanjut ke Hal: 7

Laporan: Ardi

SULTRA, BP-Mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) yang merupakan alumni SMAN 2 Baubau Muh Haykal Faturrahman Kasri, berhasil lolos sebagai finalis dalam ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo Kendari.

Haykal yang merupakan mahasiswa

semester empat Jurusan Teknik Perkapalan itu mengikuti lomba bersama tim riset kampusnya mewakili UNDIP. Mereka mengangkat subtema marine transportation technology dalam kompetisi bertema "Transformasi Teknologi Berkelanjutan untuk Penguatan Ketahanan Energi dan Infrastruktur Cerdas di Kawasan Pesisir dan

Lanjut ke Hal: 7

ATR/BPN Busel dan Pemda Busel Hadiri Kegiatan Yang Diinisiasi KPK Soal Percepat Integrasi Data BPHTB, Sinkronisasi NIB dan NOP Juga Dipercepat demi Kepastian Hukum Masyarakat



Laporan: Firman
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seSulawesi Tenggara termasuk pemda Buton Selatan bersama

Lanjut ke Hal: 7

Sekda La Ode Harwanto: Pemkab Buton Selatan Dukung Program PSN Terintegrasi Lewat Gerai KMP, KNMP, Ketahanan Pangan dan MBG

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP -Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyambut peluncuran Gerai Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional (PSN) yang diresmikan serentak pemerintah pusat di berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Buton Selatan, peresmian dipusatkan di

Lanjut ke Hal: 7



Pemda Busel dan Forkopimda hadiri pengresmian Kopdes Merah Putih Serentak oleh Presiden Prabowo melalui zoom

Bupati Buton Alvin Akawijaya Temui Dirjen Bina Marga Perjuangkan Peran Strategis Industri Hilirisasi Aspal Buton

bangunan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, BUMN Sucofindo, pelaku industri, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, hadir langsung dalam forum itu untuk mengawal kepentingan daerah penghasil Asbuton agar kebijakan hilirisasi nasional tidak hanya berfokus pada penggunaan material, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah penghasil.

"Kami mendukung penuh penguatan penggunaan Aspal Buton secara nasional. Harapan kami, hilirisasi ini mampu menghadirkan investasi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi

masyarakat di Kabupaten Buton," ujar Alvin.

Menurut Alvin, Aspal Buton merupakan potensi strategis nasional yang selama puluhan tahun belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, cadangan Asbuton di Pulau Buton dikenal sebagai salah satu deposit aspal alam terbesar di dunia dengan potensi mencapai ratusan juta ton. Aspal alam Buton telah dikenal sejak era kolonial Belanda dan mulai dimanfaatkan secara terbatas sejak awal abad ke-20 untuk kebutuhan konstruksi jalan di Indonesia.

Secara historis, pemerintah Indonesia telah beberapa kali mendorong penggunaan Asbuton sebagai substitusi aspal impor. Pada era 1970-an hingga 1980-an, Asbuton sempat menjadi bagian penting pembangunan infrastruktur nasional, namun

penggunaannya menurun karena dominasi aspal minyak impor dan keterbatasan teknologi pengolahan saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kembali menghidupkan program hilirisasi Asbuton guna memperkuat ketahanan material infrastruktur nasional.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan pemerintah tengah memperkuat regulasi penggunaan Asbuton melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penggunaan Asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan periode 2026-2029.

"Asbuton memiliki posisi sangat strategis karena bukan hanya komoditas, tetapi aset nasional yang harus didorong menjadi kekuatan industri dalam negeri," kata Roy. Ia menambahkan, pemerintah

menargetkan penggunaan Aspal Buton di wilayah Jawa dan Bali mencapai 100 persen pada 2027, sementara daerah lain ditargetkan sebesar 35 persen. "Saya berharap Sulawesi juga bisa mencapai 100 persen karena Aspal Buton berasal dari Sulawesi," ujarnya.

Selain penyusunan PermenPU, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan draft Peraturan Presiden mengenai penggunaan Aspal Buton dari sektor hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem industri Asbuton nasional yang lebih kuat sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor, sebagaimana dilakukan sejumlah negara penghasil sumber daya strategis di dunia yang berhasil membangun industri hilir berbasis komoditas domestik. (*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Reformasi Pelayanan Publik Lewat Sidak OPD, Tegaskan ASN Harus Jujur dan Tepat Waktu

Selatan.

Dalam kegiatan itu, Bupati Adios didampingi Sekretaris Daerah, Asisten I, II, dan III Setda Buton Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka meninjau langsung aktivitas pelayanan dan kondisi kedisiplinan ASN di sejumlah kantor pemerintahan.

"Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, bersih, dan dipercaya masyarakat," kata Bupati Adios saat memberikan arahan kepada ASN di sela-sela sidak tersebut.

Menurut dia, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Karena itu, ASN diminta menjaga integritas, hadir tepat waktu, serta mengedepankan budaya kerja yang profesional.

Ia menambahkan,

tanggung jawab sebagai aparatur negara bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. "Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga di hadapan Allah SWT," ujarnya.

Bupati Adios juga menilai penguatan disiplin ASN menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang selama ini terus didorong pemerintah pusat. Secara nasional, agenda reformasi birokrasi mulai diperkuat sejak diterbitkannya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam konteks internasional, peningkatan kualitas pelayanan aparatur negara juga menjadi perhatian banyak negara melalui kon-

sep good governance yang dikembangkan sejak dekade 1990-an oleh lembaga-lembaga global, termasuk Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep tersebut menempatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas sebagai indikator utama pemerintahan modern.

"Kalau disiplin dan semangat belayani terus dijaga bersama, Insya Allah Buton Selatan akan menjadi daerah yang maju dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Adios.

Sidak tersebut diharapkan menjadi evaluasi sekaligus pengingat bagi seluruh ASN agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga berkomitmen memperkuat budaya kerja yang profesional demi mendukung percepatan pembangunan daerah dan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. (*)

Mahasiswa Teknik Perkapalan UNIP, Alumni SMAN 2 Baubau Muh Haykal Faturrahman Kasri Bersinar di Ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Halu Oleo, Gagasan Teknologi Transportasi Laut

"Karena fokus kami di bagian transportasi laut, kami mengambil subtema marine transportation technology," ujar Haykal, Sabtu (16/5/2026), ketika dihubungi Koran Baubau Post. Ia menjelaskan, lomba tersebut memiliki tiga subtema utama, yakni renewable energy and energy security, smart infrastructure, dan marine transportation technology.

Tim UNIP sendiri terdiri dari tiga mahasiswa, yakni Muh Haykal Faturrahman Kasri asal Baubau, Raka Habibie Saadi asal Banyuwangi, dan Abna Falma Silka asal Jawa Timur.

Haykal menjelaskan proses kompetisi dimulai dari tahap pendaftaran, penilaian abstrak, hingga pe-

nilaian paper atau laporan ilmiah. "Peserta diminta membuat abstrak terkait inovasi yang akan dibuat, kemudian disubmit untuk dinilai. Setelah itu masuk tahap penilaian paper," katanya.

Pada tahap penilaian paper, tim dari UNIP yang beranggotakan tiga orang berhasil meraih peringkat pertama. "Alhamdulillah kami memperoleh peringkat satu untuk laporan paper," ungkapnya.

Dia pun mengungkapkan Pendaftaran lomba dibuka dalam dua gelombang, yakni 12-18 April 2026 untuk gelombang pertama dan 19-25 April 2026 untuk gelombang kedua. Tim UNIP mengikuti pendaftaran pada gelombang kedua.

Sementara penilaian abstrak dilaksanakan pada 26-28 April 2026 dan pengumuman finalis diumumkan pada 29 April 2026.

Haykal menyebut, hanya tujuh tim yang berhasil lolos ke tahap final nasional. Selain tim dari UNIP dan tuan rumah Universitas Halu Oleo, finalis juga berasal dari Universitas Jember serta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

"Kalau tidak salah dari UHO ada tiga tim yang lolos," ujarnya singkat.

Tahap final akan berlangsung di Kendari mulai 19 hingga 24 Mei 2026. Agenda kegiatan meliputi registrasi peserta, presentasi poster, presentasi full

paper, field trip, hingga pengumuman pemenang.

Presentasi poster dilaksanakan 21 Mei, lalu presentasi full paper pada 22 Mei, dan pengumuman pemenang tanggal 24 Mei," jelas Haykal. "Untuk anggota tim kami semua satu jurusan, hanya berbeda angkatan," katanya.

Haykal mengatakan, ide inovasi yang mereka angkat dilatarbelakangi kondisi wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi laut.

"Kami melihat masih banyak wilayah di Sulawesi Tenggara yang terisolasi atau masih kekurangan kapal transportasi," tuturnya. (*)

ATR/BPN Busel dan Pemda Busel Hadiri Kegiatan Yang Diinisiasi KPK Soal Percepat Integrasi Data BPHTB, Sinkronisasi NIB dan NOP Juga Dipercepat demi Kepastian Hukum Masyarakat

pertanahan dan perpajakan guna meningkatkan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memperkuat kepastian hukum, serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah tersebut dilakukan karena selama ini perubahan hak milik tanah belum secara otomatis diikuti perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Akibatnya, data pertanahan dan perpajakan sering kali tidak sinkron dan berdampak pada lambannya pelayanan administrasi kepada masyarakat.

"Yang kita bangun adalah pelayanan tunggal kepada masyarakat. Karena itu, ego sektoral harus dihilangkan," ujar salah satu narasumber dalam kegiatan integrasi layanan pertanahan dan perpajakan yang dihadiri Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto, Kepala Dispenda Buton Selatan Amril Tamim, ATR/BPN Buton Selatan yang diwakili Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Busel Jan Sandy Harlan, S.ST, M.Si, dan Inspektoral Buton Selatan.

di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Tiba di Pangkajene Tani AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu (16/05/2026) sekitar pukul 08.00 WIB, Presiden Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan.

KNMP," ujarnya.

Ia optimistis keberadaan tujuh titik KNMP nantinya akan mempermudah distribusi ikan untuk kebutuhan masyarakat maupun program MBG di Kabupaten Buton Selatan.

Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo telah mengresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Museum Ibu Marsinah, hingga Panen Raya Jagung secara serentak yang di Pusatkan di Jawa Timur dan diikuti secara daring seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Buton Selatan.

Presiden Prabowo akan meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan op*)

yang berhasil dipetakan.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi objek pajak yang belum terdapat. Pemerintah menilai sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) sekaligus memperluas cakupan objek pajak daerah.

"Artinya masih ada bidang tanah yang belum tersentuh pajak. Ini yang harus disinkronkan antara pertanahan dan perpajakan," kata narasumber tersebut, Senin 18 Mei 2026.

Dalam Diskusi itu, diperkenalkan Integrasi layanan dilakukan melalui pemanfaatan Protokol Integrasi Aplikasi (PIA) BPHTB yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Seluruh kantor pertanahan juga diminta menyiapkan data spasial agar dapat disesuaikan dengan basis data pemerintah daerah. Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah.

Secara nasional, integrasi data pertanahan dan perpajakan telah menjadi agenda reformasi birokrasi sejak pemerintah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017. Kementerian ATR/BPN mencatat jutaan bidang tanah telah berhasil disertifikasi melalui program tersebut guna memperkuat legalitas

aset masyarakat dan mempercepat digitalisasi layanan pertanahan.

Di tingkat internasional, digitalisasi dan integrasi data pertanahan telah lama diterapkan di sejumlah negara maju seperti Singapura, Belanda, dan Australia. Sistem pertanahan berbasis digital di negara-negara tersebut terbukti mampu mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi administrasi, serta memperkuat penerimaan negara dari sektor properti dan perpajakan.

Sementara itu, penerapan sertifikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 mulai memperkuat layanan elektronik pertanahan di Indonesia, meliputi pengecekan sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), integrasi layanan, hingga peralihan hak atas tanah. Di Buton Selatan, Kota Baubau, Kendari, dan Kolaka, sekitar 98 persen layanan peralihan hak atas tanah dilaporkan dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga lima hari kerja.

"Semua kantor pertanahan diminta serius menjalankan integrasi data ini dan menyiapkan data spasial yang akurat," pinta narasumber tersebut. (*)

Sekda La Ode Harwanto: Pemkab Buton Selatan Dukung Program PSN Terintegrasi Lewat Gerai KMP, KNMP, Ketahanan Pangan dan MBG

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan La Ode Harwanto, Spd MPd menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Bupati Buton Selatan H Muh Adios atas upaya menghadirkan program tersebut di Buton Selatan.

Menurutnya, kehadiran Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) akan memberikan dampak positif yang terintegrasi bagi sektor perikanan, pertanian, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini adalah program yang sangat strategis dan berdampak sistemik secara positif bagi masyarakat," ujar Harwanto, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, baik KMP, KNMP dan Program ketahanan pangan nantinya akan dilengkapi fasilitas penggudangan dan cold storage untuk mendukung distribusi hasil perikanan. "jadi hasil cetak sawah dan tangkapan nelayan dapat disuplai langsung kepada pelaku usaha dapur MBG melalui koperasi tersebut," tuturnya.

"Pemilik dapur MBG nantinya bisa mengambil ikan segar dari cold storage yang ada di KNMP mau-

pun di coldstorage milik pemerintah daerah. Selain itu program ini nantinya akan ada turunannya yaitu merealisasikan pembangunan rumah untuk nelayan. jadi Semua terintegrasi," lanjutnya.

Selain sektor perikanan, program cetak sawah yang menjadi bagian PSN juga mulai diarahkan masuk ke Buton Selatan, khususnya di wilayah Sampolawa. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan surplus pangan daerah, terutama produksi beras.

Harwanto menyebut, kawasan pertanian yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) telah disiapkan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional tersebut.

"Program cetak sawah ini untuk mendukung kebutuhan pangan, termasuk menyuplai kebutuhan MBG," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh program tersebut dirancang saling terhubung, mulai dari hasil nelayan, produksi pertanian, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat melalui koperasi merah putih dan koperasi nelayan Merah Putih.

Prabowo Hadiri Forum Migas dan Sampaikan Pidato di DPR



Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir ke Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition di ICE BSD, .

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex di ICE BSD, Rabu (20/5). Kehadiran tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam keterangan di Kantor KSP, Selasa (19/5).

Menurut Dudung Abdurachman, acara yang digelar oleh Indonesian Petroleum Association itu akan dihadiri para pelaku industri minyak, termasuk dari kawasan ASEAN. Kegiatan berlangsung di ICE BSD.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram re-

smi @IPAconvex_, pameran tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Mei 2026. Forum ini menjadi ajang pertemuan pelaku industri migas, investor, dan pemangku kebijakan.

Selain menghadiri IPA Convex, Prabowo Subianto juga dijadwalkan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rapat paripurna DPR pada hari yang sama.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa Prabowo akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan pidato langsung di forum paripurna.

purna.

Dasco menjelaskan, dalam praktik ketatanegaraan sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan Presiden hadir langsung di rapat paripurna DPR. Presiden dapat diwakili oleh menteri terkait.

Namun, menurutnya tidak ada pula larangan bagi Presiden untuk hadir langsung dan menyampaikan pidato di hadapan anggota dewan.

“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kalinya,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/5).

“Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kehadiran Prabowo

di rapat paripurna tersebut bertujuan menyatukan pandangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia menambahkan, momentum tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei.

Hari Kebangkitan Nasional sendiri diperingati setiap tahun untuk mengenang berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908.

“Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa dalam menjaga perekonomian,” ujar Prasetyo melalui pesan singkat, Selasa (19/5).(*)

Gerindra Jember Beri Sanksi Anggota Usai Viral Main Gim Saat Sidang



Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember Achmad Syahri As Sidiqi (kiri) dan Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim (kanan) tiba untuk mengikuti sidang etik di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jember, Jawa Timur, memastikan telah menjatuhkan sanksi internal berupa peringatan keras kepada salah satu anggotanya, Achmad Syahri As Sidiqi, menyusul viralnya video yang memperlihatkan dirinya bermain gim sambil merokok saat rapat paripurna.

Peristiwa tersebut terjadi dalam forum resmi DPRD Jember yang membahas agenda pemerintahan daerah, dan kemudian menjadi perhatian publik setelah rekamannya tersebar luas di media sosial. Insiden itu memunculkan kritik terkait etika kehadiran anggota dewan dalam sidang formal.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi langsung dari Syahri terkait perilaku tersebut.

“Katanya lupa belum memberi makan sapi-sapi dalam permainan gim pertanian,” ujar Hanan Kukuh, merujuk pada penjelasan Syahri yang disebut sedang memainkan gim simulasi pertanian di ponselnya saat rapat berlangsung.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa kasus

tersebut telah ditangani melalui mekanisme etik partai dan diproses di Majelis Kehormatan Partai (MKP) di Jakarta.

Dalam putusannya, Partai Gerindra menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan menegaskan bahwa pelanggaran serupa tidak akan ditoleransi kembali.

“Kalau ada kesalahan yang serupa dilakukan, tentu sanksinya bisa lebih berat, termasuk pemberhentian sebagai anggota DPRD Jember,” kata Hanan menegaskan sikap fraksi.

Di sisi lain, Syahri tidak menghadiri dua agenda rapat paripurna DPRD Jember pada Senin, termasuk pembahasan Propemperda 2026 dan laporan reses I tahun 2026. Ia ingin formasikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan kondisi kesehatan yang kurang baik.

Sebelumnya, Syahri telah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya. “Saya cukup menyesal sekali dan tidak akan mengulangi perbuatan itu,” ujarnya dalam pernyataan terdahulu.

Meski telah meminta maaf, proses etik tidak berhenti di ting-

kat partai. Sanksi kelembagaan dari DPRD Jember melalui Badan Kehormatan (BK) masih menunggu tindak lanjut sesuai mekanisme internal dewan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya disiplin etika anggota legislatif dalam menjalankan tugas. Dalam konteks historis, berbagai parlemen di dunia juga pernah menghadapi kasus pelanggaran etik, mulai dari penggunaan gawai saat sidang di sejumlah negara Eropa hingga kasus serupa di parlemen Asia yang memicu sanksi disiplin internal.

Di Indonesia sendiri, Badan Kehormatan DPRD maupun DPR RI secara berkala menangani kasus pelanggaran etika, yang umumnya berkaitan dengan ketidakhadiran, pelanggaran tata tertib sidang, hingga perilaku yang dinilai tidak mencerminkan kehormatan lembaga legislatif.

Insiden di DPRD Jember ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi dan gim digital di ruang publik tetap harus diimbangi dengan kedisiplinan dalam forum resmi kenegaraan maupun pemerintahan daerah. (*)

Muhammad Fadlansyah Resmi Jadi Pj Sekda Sultra Hingga Tiga Bulan



ubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melantik Drs. Muhammad Fadlansyah sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (18/5/2026)

Laporan: Mashuri

S U L T R A , BP-Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melantik Drs. Muhammad Fadlansyah sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (18/5/2026). Pelantikan itu dilakukan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat.

M u h a m m a d Fadlansyah akan menjalankan tugas sebagai Pj Sekda selama tiga bulan hingga ditetapkannya sekretaris daerah definitif. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sultra sejak 20 April 2026 dan saat ini masih mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sultra.

Dalam arahnya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang menentukan efektivitas jalannya pemerintahan daerah. Karena itu,

seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat sinergi dan mempercepat penyelesaian program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekretaris Daerah bukan hanya jabatan administratif, tetapi penggerak utama koordinasipemerintahan. Semua perangkat daerah harus bekerja terintegrasi agar pelayanan publik berjalan optimal,” kata Andi Sumangerukka.

Menurut gubernur, masyarakat kini menuntut kehadiran pemerintah yang lebih responsif, cepat, dan mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan daerah. Kondisi tersebut menuntut aparat pemerintah bekerja lebih efektif di tengah keterbatasan anggaran.

“Tuntutan masyarakat semakin besar. Mereka ingin pemerintah hadir dan bekerja nyata. Karena itu, tidak ada lagi ruang untuk bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

P e l a n t i k a n Pj Sekda Sultra dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima persetujuan Menteri Dalam Neg-

eri melalui surat Nomor 100.2.2.6 tertanggal 7 Mei 2026. Kehadiran Pj Sekda diharapkan dapat menjaga stabilitas birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi sentral sebagai koordinator administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran, hingga pembinaan aparatur sipil negara.

Reformasi birokrasi yang diperkuat sejak era otonomi daerah pada awal 2000-an menempatkan Sekda sebagai penghubung utama antara kepala daerah dan OPD.

Secara nasional, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi pemerintah pusat dalam satu dekade terakhir. Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi, efisiensi anggaran, serta penguatan akuntabilitas kinerja aparatur negara.

Di tingkat inter-

nasional, tren modernisasi birokrasi juga dilakukan berbagai negara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Organisasi seperti United Nations dan Organisation for Economic Co-operation and Development secara konsisten mendorong pemerintahan di berbagai negara memperkuat pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Seluruh jajaran harus memberikan dukungan penuh demi terlaksananya tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang optimal,” tutur gubernur.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, serta kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Momentum itu sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.*

Pemprov Sultra dan Polri Kolaborasi Tingkatkan Produksi Jagung



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak Kuartal II Tahun 2026

Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak Kuartal II Tahun 2026 yang berlangsung di kawasan Labibia, Kota Kendari, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan benih dan pupuk kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Panen raya itu menjadi bagian dari agenda nasional Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dilaksanakan bersamaan dengan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengikuti agenda nasional tersebut secara virtual bersama Ketua DPRD Sultra, Wali Kota Kendari, Wakapolda Sultra, jajaran Polda Sulawesi Tenggara, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Usai mengikuti kegiatan virtual, gubernur bersama para pejabat turun langsung ke lahan pertanian di kawasan Labibia untuk melakukan panen jagung bersama petani. Panen dilakukan di lahan seluas sekitar satu hektare dengan estimasi hasil mencapai tiga ton jagung.

Dalam kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama

Polda Sultra menyerahkan bantuan kepada Kelompok Tani Matang Gonawe berupa 40 kilogram benih jagung dan 125 kilogram pupuk sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan hasil produksi pertanian.

“Ini panen raya kuartal kedua, berarti sebelumnya pada kuartal pertama juga sudah dilakukan. Hasilnya luar biasa dan kualitas jagung yang dipanen sangat bagus,” kata Andi Sumangerukka.

Menurut gubernur, keterlibatan berbagai pihak dalam sektor pertanian menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memperluas pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan produktif. Ia menilai program tersebut memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

“Program ini bukan hanya mendukung swasembada pangan nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan petani di daerah,” ujarnya.

Secara nasional, jagung merupakan salah satu komoditas strategis setelah beras. Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, program peningkatan produksi jagung mulai diperkuat sejak awal 2000-an melalui perluasan lahan tanam, distribusi benih unggul, dan modernisasi alat pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri pakan ternak.

Data Kementerian Pertanian menunjuk-

kan produksi jagung Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, terutama di daerah sentra pertanian di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga mendorong penguatan cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global.

Di tingkat internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat jagung menjadi komoditas sereal terbesar di dunia dengan tingkat produksi melampaui gandum dan beras. Amerika Serikat, China, dan Brasil masih menjadi produsen utama jagung global yang menopang kebutuhan pangan dan energi dunia.

Gubernur Sultra menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, dan kelompok tani harus terus diperkuat agar ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. “Ketahanan pangan harus dijaga bersama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Program panen raya jagung serentak tersebut sekaligus menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian daerah sebagai salah satu penopang stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.*

Presiden Prabowo Luncurkan KDKMP, Buton Siap Perkuat Ekonomi Desa



Pemerintah Kabupaten Buton menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (16/5/2026). Peresmian tersebut diikuti secara daring oleh Pemkab Buton dari KDMP Wakalambe, Kecamatan Kapontori.

Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa mengatakan koperasi desa merupakan instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Menurut dia, seluruh manfaat koperasi nantinya akan kembali kepada masyarakat desa.

"Koperasi ini sifatnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Seluruh keuntungan dan Sisa Hasil Usaha akan kembali kepada anggota demi kesejahteraan warga," ujar Syarifudin Saafa.

Peresmian nasional dipusatkan di Kabupaten Nganjuk dan diikuti

seluruh pemerintah kabupaten/kota melalui sambungan virtual. Selain Wakil Bupati Buton, kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Dandim 1413 Buton Letkol Inf Arif Nofiyanto, Sekda Buton La Ode Syamsuddin, para kepala OPD, camat, kepala desa, hingga pendamping KDMP.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi desa berbasis koperasi. Ia menilai percepatan pembangunan koperasi tersebut sebagai capaian besar nasional.

"Kita mendirikan KDKMP mulai dari konsep hingga operasional hanya kurang dari satu tahun. Ini prestasi besar bangsa Indonesia," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan pembangunan fisik koperasi dimulai pada November 2025 dan dalam waktu tujuh bulan telah berhasil dioperasionalkan secara serentak di berbagai daerah. Setiap unit koperasi nan-

tinya dikelola 18 personel yang terdiri atas tenaga ahli pangan dan tenaga lokal desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kehadiran KDKMP bukan sekadar pembangunan gedung koperasi, melainkan langkah memperluas pemerataan ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program tersebut.

"Hari ini Presiden tidak hanya meresmikan gedung, tetapi meresmikan instrumen keadilan ekonomi bagi desa-desa di Indonesia," ujar Zulkifli Hasan melalui sambungan virtual.

Secara historis, koperasi memiliki akar panjang dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Gagasan ekonomi berbasis koperasi telah diperjuangkan sejak masa Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada 12 Juli 1947, Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya menjadi tonggak lahirnya gerakan

koperasi nasional yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional.

Dalam perkembangan global, model koperasi juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di sejumlah negara. International Cooperative Alliance (ICA) mencatat lebih dari satu miliar penduduk dunia terlibat dalam koperasi di berbagai sektor, mulai dari pangan, pertanian, hingga jasa keuangan. Di negara seperti Jepang dan Korea Selatan, koperasi desa berkembang menjadi kekuatan ekonomi lokal yang menopang distribusi pangan dan kesejahteraan petani.

Di Kabupaten Buton, program KDKMP diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat rantai ekonomi desa. Pemerintah daerah optimistis keberadaan koperasi berbasis masyarakat itu dapat meningkatkan akses usaha, memperkuat distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.*

Dr. Azhari Serap Aspirasi Warga dalam Kunker Perdana Talaga Raya



Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, melakukan kunjungan kerja perdana ke Kecamatan Talaga Raya,

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, melakukan kunjungan kerja perdana ke Kecamatan Talaga Raya, Senin (18/5/2026), guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah kepulauan tersebut. Kunjungan itu turut dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan air bersih, kondisi jalan lingkungan kecamatan, pasokan listrik di pulau-pulau sekitar, hingga kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

"Kami ingin memastikan pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat untuk melihat kondisi riil di lapangan," ujar Dr. Azhari saat berdialog dengan warga Talaga Raya.

Selain menggelar tatap muka bersama masyarakat, Bupati juga menghadiri pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah tantangan ekonomi masyarakat kepu-

luan.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pelayanan kesehatan gratis dan sunatan massal bagi warga. Program sosial tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena dinilai membantu kebutuhan pelayanan dasar, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Dr. Azhari bersama rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas strategis, antara lain jalan lingkungan Kecamatan Talaga Raya, gedung dan pelayanan Puskesmas, serta kawasan yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor wisata daerah.

Menurut dia, pengembangan kawasan kepulauan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih cepat. "Talaga Raya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata. Karena itu konektivitas dan layanan dasar harus diperkuat," katanya.

Secara historis, pembangunan wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau. Pemerintah pusat sejak awal era otonomi daerah terus mendorong pemerataan pembangunan melalui program percepatan kawasan tertinggal dan penguatan konektivitas

antarpulau.

Di tingkat internasional, negara-negara kepulauan seperti Jepang dan Filipina juga menghadapi tantangan serupa dalam pemerataan layanan publik. Kedua negara tersebut menitikberatkan pembangunan pada penguatan transportasi laut, ketahanan infrastruktur pesisir, dan pelayanan kesehatan terpadu di wilayah terpencil.

Kecamatan Talaga Raya sendiri merupakan salah satu wilayah kepulauan di Kabupaten Buton Tengah yang memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, kondisi geografis yang terpisah antarpulau membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan perhatian dan biaya lebih besar dibanding wilayah daratan.

"Semua masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan program prioritas pemerintah daerah ke depan," ujar Dr. Azhari.

Kunjungan kerja perdana tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan di Kecamatan Talaga Raya sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Buton Tengah.*

BPJS dan Polri Uji Sistem JKN Aktif untuk Syarat Layanan SIM



Penerapan kebijakan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) memasuki tahap uji sistem di Kota Medan.

Peliput: Warman

JAKARTA, BP- Penerapan kebijakan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) memasuki tahap uji sistem di Kota Medan. Uji lapangan ini dilakukan untuk memastikan integrasi data antara layanan kepolisian dan kepesertaan jaminan kesehatan berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

Kegiatan tersebut melibatkan BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui field test di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (5/5). Sistem ini dirancang agar status kepesertaan JKN dapat terverifikasi secara otomatis saat proses pengajuan SIM berlangsung.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan

kan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi Program JKN. Ia menegaskan bahwa integrasi layanan publik menjadi salah satu langkah strategis memperluas cakupan kepesertaan aktif di masyarakat.

“Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, Polri bersama BPJS Kesehatan telah menerbitkan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur kepesertaan JKN aktif sebagai syarat penerbitan SIM,” ujar Akmal.

Ia menambahkan, implementasi awal telah dilakukan sejak 2024 di sejumlah daerah sebelum diperluas secara nasional. “Kami ingin memastikan proses layanan SIM tetap cepat, mudah, dan tidak menghambat masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap Program JKN,” kata Akmal. Secara teknis,

sistem akan membaca Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon SIM dan mencocokkannya dengan data JKN. Status kepesertaan akan muncul secara otomatis di sistem layanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan, termasuk keterangan aktif, tidak aktif, atau belum terdaftar.

Program ini berakar dari kebijakan nasional JKN yang diluncurkan pada 2014 sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan Indonesia menuju cakupan kesehatan semesta (universal health coverage). Secara global, kebijakan serupa juga sejalan dengan agenda World Health Organization (WHO) dan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB yang menargetkan akses kesehatan universal pada 2030.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Firman Darmansyah, men-

yatakan dukungan terhadap integrasi sistem tersebut meski mengakui masih rendahnya kesadaran masyarakat. “Kami mendukung penuh integrasi ini agar layanan SIM berjalan lancar dan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kepesertaan JKN,” ujarnya.

Firman menambahkan, pihaknya akan memperkuat sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. “Edukasi publik menjadi kunci, termasuk melalui video singkat agar masyarakat memahami pentingnya JKN aktif dalam layanan SIM,” katanya.

Dengan integrasi ini, pemerintah berharap layanan publik berbasis digital semakin efisien sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengurangi aksesibilitas.*

WHO Tetapkan Ebola Jadi PHEIC, Indonesia Perketat Pengawasan Pintu Masuk



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada 17 Mei 2026. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di Tanah Air, namun meningkatkan kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara.

Penetapan status darurat global tersebut dilakukan WHO setelah mencermati peningkatan kasus di Provinsi Ituri, RD Kongo, yang disebabkan virus Ebola jenis Bundibugyo. Hingga 16 Mei 2026, tercatat 246 kasus suspek, termasuk 8 kasus konfirmasi dengan 80 kematian, serta tingkat fatalitas mencapai 32,5 persen. Penyebaran juga dilaporkan meluas secara terbatas ke wilayah Uganda dan Kinshasa akibat mobilitas penduduk.

Sebagai respons, Kemenkes memperketat skrining kesehatan di bandara dan pelabuhan, memperkuat sistem pelaporan 24 jam melalui Sistem Kewaspadaan

Dini dan Respons (SKDR), serta mengaktifkan Public Health Emergency Operation Center (PHEOC). Laboratorium nasional juga disiagakan untuk mempercepat deteksi dini bila ditemukan dugaan kasus impor.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan nasional menghadapi risiko penyakit menular lintas negara. “Kami memastikan seluruh pintu masuk negara meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, terutama dari wilayah terdampak,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/5).

Virus Ebola diketahui menular melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau benda yang terkontaminasi dari manusia maupun hewan terinfeksi. Masa inkubasi berkisar 2 hingga 21 hari dengan gejala awal berupa demam, lemah, nyeri otot, hingga dapat berkembang menjadi muntah, diare, dan perdarahan.


Secara historis, Ebola pertama kali diidentifikasi pada 1976 di Sudan dan RD Kongo. Wabah terbesar terjadi di Afrika Barat pada 2014-2016 yang menewaskan leb-

ih dari 11 ribu orang. WHO sendiri telah beberapa kali menetapkan status PHEIC, termasuk pada wabah Ebola dan COVID-19, sebagai bentuk kewaspadaan global terhadap ancaman kesehatan lintas negara.

Selain RD Kongo, kasus terkait perjalanan juga ditemukan di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Kondisi ini menunjukkan potensi penyebaran lintas batas negara, terutama di kawasan dengan sistem kesehatan yang masih terbatas dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Juru bicara Kemenkes menegaskan masyarakat tidak perlu panik, namun harus tetap waspada dan disiplin menjaga kebersihan. “Masyarakat diimbau tidak mudah percaya informasi yang tidak terverifikasi dan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” kata Aji.

Ia menambahkan, pelaku perjalanan dari negara terdampak diminta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala dalam 21 hari setelah kepulangan. “Kejujuran mengenai riwayat perjalanan sangat penting untuk mencegah penularan lebih lanjut,” ujarnya.*

<p>PT FAREN GRAFIKA</p>  <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Kasus Gratifikasi, KPK Amankan Mobil dari Kediaman Bupati Ponorogo



KPK usut kasus TPPU Bupati Ponorogo

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak an penyitaan terhadap empat unit kendaraan usai penggeledahan di rumah kediaman Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, di Desa Bajang, pada Selasa (19/5). Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ponorogo dua periode, yakni 2021-2025 dan 2025-2030, Sugiri Sancoko, menjadi salah satu pihak yang kediamannya digeledah dalam rangka pengumpulan alat bukti oleh penyidik.

usut. Total empat kendaraan itu kemudian diamankan untuk kepentingan pembuktian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan aktif.

“Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita barang bukti berupa empat unit mobil,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk periode 2020-2026. KPK diketahui telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada April 2026 sebagai dasar hukum penanganan perkara.

Selain rumah pribadi kepala daerah, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas

Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo pada hari yang sama untuk memperluas pencarian barang bukti.

Dari dua kantor tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen administrasi, surat-surat penting, serta Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana maupun praktik gratifikasi yang diselidiki.

“Selanjutnya, barang bukti hasil penggeledahan tersebut dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses penyidikan perkara,” kata Budi Prasetyo.

Sebelumnya, pada Senin (18/5), KPK juga melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha bernama Citra Margaretha di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Pacitan, dan menyita dua unit telepon genggam sebagai barang bukti elektronik.

Jika ditarik

dalam konteks lebih luas, langkah KPK ini sejalan dengan mandat pemberantasan korupsi di Indonesia sejak berdirinya lembaga tersebut pada 2002, serta penguatan rezim hukum TPPU melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memungkinkan pelacakan aset hasil kejahatan.

Secara global, penindakan kasus seperti ini juga selaras dengan implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menekankan pentingnya pemulihan aset (asset recovery) dalam kejahatan korupsi lintas negara.

Hingga kini, KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri aliran dana, pihak yang diduga terlibat, serta memperdalam dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (*)

Denpom Bekuk Anggota TNI Terduga Cabuli Siswi SD di Konsel Setelah Sebulan Buron



Aparat Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIV/3 Kendari menangkap seorang anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB

Laporan: Hadi

SULTRA, BP-Aparat Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIV/3 Kendari menangkap seorang anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB yang diduga melakukan pencabulan terhadap siswi sekolah dasar di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, setelah sempat buron selama sekitar satu bulan.

Komandan Denpom XIV/3 Kendari Letkol CPM Haryadi Budaya Pela mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa pagi setelah aparat melakukan pencarian di sejumlah lokasi persembunyian pelaku.

“Sudah ditangkap tadi pagi,” kata Haryadi, Rabu (20/5). Menurut Haryadi, pelaku sebelumnya melarikan diri saat menjalani pemeriksaan di Kodim 1417/Kendari. Sejak saat itu, aparat militer menetapkan Sertu MB sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan melakukan pengejaran lintas daerah.

Kasus tersebut bermula dari laporan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di rumah pelaku di Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, pada 14 April lalu. Korban diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar.

Setelah menerima laporan keluarga korban, aparat melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Namun, proses hukum sempat terhambat karena pelaku melarikan diri sebelum pemeriksaan selesai dilakukan.

“Kita proses sesuai aturan yang berlaku terkait tindak pidananya,” ujar Haryadi.

Saat ini, Sertu MB masih menjalani pemeriksaan intensif di Kabupaten Bone sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut. Denpom memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum militer.

Keluarga korban menyebut kondisi psikologis anak mengalami tekanan berat setelah peristiwa tersebut. Korban disebut beberapa kali menangis histeris dan mengalami trauma akibat

dugaan tindak asusila yang dialaminya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang terjadi di lingkungan terdekat korban.

Secara global, UNICEF mencatat jutaan anak di berbagai negara menjadi korban kekerasan seksual setiap tahun. Lembaga internasional itu menilai penegakan hukum yang cepat dan perlindungan psikologis korban menjadi langkah penting untuk mencegah dampak trauma berkepanjangan pada anak.

Kasus yang menyeret aparat negara tersebut kini menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara. Denpom XIV/3 Kendari menegaskan proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan secara terbuka dan tuntas. (*)

Pemkot Baubau Desak PLN Tata Ulang Jaringan Demi Keselamatan Warga



Pemerintah Kota Baubau mengambil langkah preventif dengan melayangkan surat resmi kepada PLN agar segera melakukan penataan ulang jaringan listrik yang dinilai semrawut dan membahayakan masyarakat.

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau mengambil langkah preventif dengan melayangkan surat resmi kepada PLN agar segera melakukan penataan ulang jaringan listrik yang dinilai semrawut dan membahayakan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya temuan kabel listrik yang tidak tertata serta kondisi tiang listrik yang mulai miring di sejumlah titik di Kota Baubau.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Drs. La Ode Muh Takdir, M.Si., mengatakan, kondisi jaringan listrik saat ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama saat musim penghujan yang identik dengan cuaca ekstrem. "Pemkot Baubau

sudah menyampaikan surat resmi kepada PLN agar segera melakukan penataan dan evaluasi jaringan listrik yang ada di lapangan," ujar La Ode Muh Takdir dalam keterangannya di ruang kerjanya, Selasa (19/05/2026).

Menurut dia, hasil pemantauan pemerintah daerah menunjukkan masih banyak kabel listrik yang menjuntai dan bercampur dengan ranting pohon. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu korsleting atau arus pendek apabila terjadi hujan deras disertai angin kencang.

"Yang menjadi perhatian kami adalah keselamatan masyarakat. Kabel yang bergesekan dengan dahan pohon sangat berisiko menimbulkan korsleting," katanya.

Selain kabel listrik yang tidak tertata, Pemkot Baubau juga menyoroti kondisi

fisik tiang listrik milik PLN yang mulai bengkok bahkan miring. Pemerintah daerah khawatir tiang-tiang tersebut roboh ketika terjadi cuaca buruk atau pergerakan tanah.

"Banyak tiang listrik yang kondisinya sudah tidak normal. Kalau dibiarkan, tentu berbahaya bagi warga yang berada di sekitar jaringan listrik itu," tambahnya.

Secara historis, persoalan jaringan listrik yang tidak tertata menjadi perhatian di banyak daerah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden korsleting listrik saat musim hujan kerap terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, hingga Makassar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga pernah mencatat bahwa gangguan jaringan listrik akibat cuaca dan pohon tumbang menjadi salah satu penyebab utama pemadaman lis-

trik di wilayah perkotaan.

Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara. Di India dan Filipina, misalnya, pemerintah daerah secara berkala melakukan penataan kabel udara untuk mengurangi risiko kebakaran dan kecelakaan akibat cuaca ekstrem. Bahkan beberapa kota besar di dunia mulai menerapkan sistem kabel bawah tanah guna meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki estetika kawasan perkotaan.

Pemkot Baubau berharap PLN segera melakukan pemantauan menyeluruh, evaluasi teknis, serta pembenahan jaringan listrik sebelum terjadi insiden yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan tertata rapi bagi masyarakat. (*)

Hadapi Lonjakan Harga, Baubau Intensifkan Pasar Murah Bersubsidi Jelang Iduladha 1447 H



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau menggelar pasar murah bersubsidi sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah. Kegiatan yang dipusatkan di eks Kantor Disperindag Kota Baubau, Senin (18/05/2026), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, bersama jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah hingga bawang putih. Pemerintah daerah menilai intervensi harga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi menjelang hari raya kurban.

"Pasar murah bersubsidi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga dan memastikan stok pangan tetap tersedia bagi masyarakat," kata La Ode Darus Salam saat

membuka kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah karena fluktuasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan hampir selalu terjadi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara historis menjadi penyumbang utama inflasi nasional menjelang Idulfitri maupun Iduladha akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

Secara global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) juga pernah mencatat lonjakan harga pangan internasional pascapandemi Covid-19 dan konflik geopolitik dunia pada 2022-2024 yang memengaruhi rantai pasok sejumlah komoditas pangan, termasuk gandum, gula, dan minyak nabati. Kondisi tersebut mendorong banyak negara memperkuat cadangan pangan dan memperluas intervensi pasar domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Baubau melalui TPID menjalankan lima

strategi utama pengendalian inflasi, yakni pemantauan rutin harga dan stok pangan, koordinasi dengan Perum BULOG dan distributor, operasi pasar berkala, penguatan distribusi antarwilayah, serta edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak.

"Saya sudah instruksikan agar pasar murah tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi menjangkau kecamatan-kecamatan sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan lebih merata," ujar La Ode Darus Salam.

Menurut dia, pemerintah juga menjamin stok pangan di Kota Baubau dalam kondisi aman dan mencukupi hingga perayaan Iduladha. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang berpotensi memicu kelangkaan barang di pasaran.

"Kita ingin memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Sinergi pemerintah, BULOG, distributor, dan pelaku usaha menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah," tambahnya. (*)

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, TMP Baubau Ditata Ulang

Laporan: Andina L

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsos Naker) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan ziarah nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Oputa Yi Yoo, Kelurahan Bukit Wolio Indah, menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2026. Persiapan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan khidmat.

Kepala Dinsos dan Naker Kota Baubau, Amalia, mengatakan

penataan TMP menjadi bagian penting dalam menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, kegiatan ziarah nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum memperkuat nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman modern.

"Ziarah dan tabur bunga di TMP adalah agenda rutin yang sarat makna. Ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pendahulu yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan," ujar Amalia dalam siaran pers, Selasa (19/05/2026).



Sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pembersihan area makam pahlawan, pengecatan pagar dan tugu makam, hingga penataan lokasi utama pelaksanaan upacara tabur bunga. Dinsos Naker juga berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai protokol upacara kenegaraan.

"{Persiapan dilakukan sejak beberapa hari terakhir agar kondisi TMP benar-benar siap digunakan untuk pelaksanaan ziarah nasional Harkitnas tingkat Kota Baubau," katanya.

Amalia menambahkan, prosesi ziarah dan

tabur bunga nantinya direncanakan hanya diikuti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Baubau. Pembatasan peserta dilakukan agar pelaksanaan upacara lebih tertib dan berlangsung khidmat.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada 1908 yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Secara historis, momentum tersebut menandai lahirnya kesadaran persatuan bangsa dalam melawan kolonialisme melalui pendidikan dan organisasi mod-

ern.

Dalam konteks internasional, semangat kebangkitan nasional Indonesia kerap disejajarkan dengan gerakan nasionalisme di berbagai negara Asia pada awal abad ke-20, seperti gerakan kebangsaan di India dan Filipina yang sama-sama mendorong perjuangan kemerdekaan melalui penguatan identitas nasional dan pendidikan rakyat.

"Melalui peringatan Harkitnas, kami berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan penghormatan kepada jasa pahlawan terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya generasi muda," tutup Amalia. (*)